

PROSIDING

# Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia

Prosiding ini disusun berdasarkan seminar riset yang dilaksanakan  
di The Aryaduta Lippo Village, Tangerang  
17 November 2011

Editor:

Nuning Akhmadi  
*The SMERU Research Institute*



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UNICEF Indonesia,  
Lembaga Penelitian SMERU  
2012

---

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
LAPORAN PANITIA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA	v
REMARKS BY THE UNICEF DEPUTY REPRESENTATIVE AT A CONFERENCE ON RESEARCH ON CHILDREN IN EDUCATION	vii
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA	ix
SAMBUTAN WAKIL MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM SEMINAR RISET KEBIJAKAN PENDIDIKAN ANAK DI INDONESIA	xi
SESI PLENO - Pidato dan presentasi Utama: Peran Penting Penelitian dalam Penyusunan Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia - Prof.Dr. Lukman Hakim (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)	xiii
SESI PLENO - Presentasi Utama: Inisiatif Global Studi Anak Tidak Sekolah: Studi di Indonesia Dr. Suhaeni Kudus (UNICEF)	xvii
REKOMENDASI PLENO I	xxvii
<b>Tema 1: Akses Pelayanan Pendidikan</b>	
1. Penyusunan Kebijakan dan Program Untuk Mengeliminasi Angka Putus Sekolah dan Siswa Rawan Drop Out di Provinsi Jawa Timur <i>Drs. Bagong Suyanto, M.Si.</i>	2
2. Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar <i>Nasruddin, S.Pd.</i>	25
3. Pembelajaran Berbantuan Komputer untuk Anak Berkesulitan Belajar ( <i>Learning Disability</i> ) pada Usia Dini <i>Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.; Drs. Setiadi C.P., M.Pd., M.T</i>	45
4. Akses Pelayanan, Informasi, dan Edukasi pada Remaja Putri <i>dr. Satyawati Hanna Nurarif, MPH.</i>	67
Notulensi Tema 1	94
<b>Tema 2: Manajemen dan Keuangan Pendidikan</b>	
1. Evaluasi Dampak Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah: Analisis Data Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 2000 dan 2007 <i>Felix Wisnu Handoyo</i>	103
2. <i>Struggling to Improve: A case Study of the Indonesia's International Standard School in Improving its Capacity Building</i> <i>Bambang Sumintono, Ph.D. dan Nora Mislán, Ph.D.</i>	127
3. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs (Studi Kasus: Jawa Tengah) <i>Dina Agustina, SE.</i>	149
4. Kesiapan Sekolah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya <i>Prof. Irwanto, Ph.D, Dr. Weny Savitry S. Pandia, Psi., M.Si, Yapina Widyawati, M.Psi., dan Ancilla Yini Sakanti Irwan, M.App.Soc.Res.</i>	169
Notulensi Tema 2	195

---

**Tema 3: Mutu Pendidikan**

1.	Peningkatan Kinerja Guru dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Melalui <i>Lesson Study</i> <i>Dr. Ulfa Maria, M.Pd.</i>	201
2.	Teacher Certification in Indonesia: A Confusion of Means and Ends <i>Mohamad Fahmi, SE., M.T., Achmad Maulana, SE., dan Dr. Arief Anshory Yusuf</i>	220
3.	Manajemen Proses Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar di Pulau Terpencil, Kasus: Peningkatan Mutu SD di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) <i>Prof. Dr. H. A. R. Tilaar, M.Sc.Ed.</i>	237
4.	Penerapan Pembelajaran Salingtemas Melalui Pembuatan Papan Komposit Sabut Kelapa sebagai Keterampilan Proses Sains <i>Nurmaulita, S.Pd. M.Si.</i>	283
Notulensi Tema 3		303

**Tema 4: Pendidikan, Kesehatan, dan Isu-isu Baru**

1.	Manfaat Asupan Zat Gizi, Dampak Kebiasaan Menonton TV dan Bermain Game terhadap Prestasi Belajar Siswa SD/MI <i>Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika, M.Sc.</i>	314
2.	Pengembangan Model Pelatihan <i>Respect</i> bagi Guru untuk Mencegah Kekerasan di Sekolah Dasar <i>Ariefa Efaningrum, M.Si.</i>	336
3.	Studi Kebijakan Terkait Keberadaan Guru Pembimbing Khusus dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia <i>Emilia Kristiyanti, Bambang Basuki, Juang Sunanto, M. Arief Firdaus, Roy Tjiong, Silvana Faillace, Tolhas Damanik</i>	351
4.	Gambaran Aktifitas Kegiatan Sehari-Hari Dasar (ADL Dasar) Anak dengan Retardasi Mental Berat di SLB Wilayah Kabupaten Bandung <i>dr Siti Aminah SpS(K), M.Si.Med.</i>	367
Notulensi Tema 4		387

**Tema 5: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

1.	Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Berbasis Kemitraan Antara Sekolah dan Keluarga pada Siswa Taman Kanak-Kanak Islam Sabilillah, Malang <i>Dr. Mohammad Maskan, M.Si., Dr. Alifiulahatin Utaminingsih, M.Si.</i>	396
2.	Pentingnya Pendidikan Gizi Seimbang Sejak Usia Dini melalui Sekolah Dasar dan PAUD <i>Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si.</i>	411
3.	PAUD: Beroperasinya Modal Budaya dan Kesiapan Sekolah di Banten <i>Drs. Priyono Sadjjo, M.Si.</i>	434
4.	Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Motorik Halus dalam Pemahaman Pendidik Taman Kanak-Kanak <i>Mardha Tresnowaty Putri, S.Psi. dan Yanti Dewi Purwanti S.Psi.</i>	461
Notulensi Tema 5		474

REKOMENDASI SESI PLENO II	479
---------------------------	-----

HASIL DISKUSI, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI LIMA TEMA	482
---	-----



---

## 2 Pemetaan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

*Nasruddin, S.Pd., M.Sc. \**

### **ABSTRAK**

Tujuan pendidikan nasional diletakkan pada tiga pilar, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Pilar pemerataan kesempatan dan perluasan akses merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penciptaan dan peningkatan layanan pendidikan kepada seluruh warganegara. Dalam kerangka itu Pemerintah Indonesia mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan tuntas pada 2008 dengan Gerakan Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) tahun 2008, Kabupaten Banjar merupakan kabupaten dengan jumlah desa tertinggal tertinggi, yakni 42 desa yang masuk dalam enam wilayah kecamatan, yang memiliki hubungan pada anak tidak sekolah dan putus sekolah usia 7-15 tahun. Data hasil pemeriksaan BPK RI Tahun 2008 menunjukkan bahwa pada 2006 penduduk Kabupaten Banjar yang tidak memperoleh pendidikan dasar sebanyak 10.529 jiwa, terdiri dari 753 jiwa usia 7–12 tahun (SD/MI), dan 9.776 jiwa usia 13–15 tahun (SMP/MTs).

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui (1) distribusi (identitas, dan jumlah) anak tidak dan putus sekolah yang berusia 7–15 tahun; (2) faktor penyebab anak tidak dan putus sekolah usia 7–15 tahun; dan (3) kebijakan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di daerah tertinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anak tidak sekolah usia 7–15 tahun adalah 598 jiwa, yang terdistribusi di Kecamatan Sungai Tabuk (211 jiwa), Aluh-Aluh (128 jiwa), Simpang Empat (103 jiwa), Astambul (101 jiwa), Sungai Pinang (38 jiwa) dan terendah di Kecamatan Kertak Hanyar (17 jiwa). Jumlah anak putus sekolah tercatat 251 jiwa, tersebar di wilayah Kecamatan Simpang Empat (77 jiwa), Sungai Pinang (64 jiwa), Aluh-Aluh (51 jiwa), Sungai Tabuk (36 jiwa), Astambul (17 jiwa), dan terendah di Kecamatan Kertak Hanyar (6 jiwa).



---

Terdapat enam faktor penyebab anak tidak sekolah, yakni: jumlah beban tanggungan keluarga (28%), pendapatan orang tua (27%), anak bekerja (21%), anak tidak minat sekolah (16%), yatim piatu (5%), dan kesulitan akses menuju satuan pendidikan (3%). Terdapat 10 faktor penyebab anak putus sekolah usia 7–15 tahun, yakni: anak bekerja (29,48%), kawin muda (22,71%), malas (17,93%), berhenti sendiri (13,94%), ikut orang tua (5,98%), ekonomi orang tua (5,18%), bantu orang tua (2,39%), cacat fisik (1,20%), IQ rendah (0,80%), dan bolos (0,40%). Kebijakan penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di daerah tertinggal dapat dilaksanakan dengan program utama pada peningkatan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan yang seiring dengan kebijakan Rencana Strategis Kabupaten Banjar.

Kata Kunci: pendidikan, anak tidak sekolah, anak putus sekolah

---

*\*Nasruddin, S.Pd., M.Sc. adalah Staf Pengajar FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan mahasiswa Jenjang S-3 di Ilmu Geografi, Universitas Gadjah Mada.*



---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Pembaca Hasil Penelitian yang Disasar Sewaktu Penelitian Dikembangkan

Topik penelitian pemetaan anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pemetaan pendidikan telah dilaksanakan oleh beberapa kabupaten kota di Indonesia, di antaranya Kota Banjarbaru, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Kediri, dan Kabupaten Pamekasan. Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan dua pemetaan, yakni pemetaan sarana/prasarana dan pemetaan kinerja guru. Dua pemetaan itu sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, khususnya bagi Dinas Pendidikan setempat untuk membuat kebijakan strategis Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru ke depan (Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, 2008). Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar merupakan wilayah yang bertetangga, namun terdapat perbedaan dalam penelitian pemetaan anak tidak sekolah dan putus sekolah di Kabupaten Banjar. Perbedaan yang mendasar adalah penelitian di Kabupaten Banjar merupakan upaya memberikan informasi mengenai sebaran anak tidak sekolah dan putus sekolah yang berimplikasi terhadap daerah atau desa tertinggal.

Pemetaan pendidikan juga telah dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa hal, antara lain uraian tentang kondisi pendidikan dan pemerataan pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul. Penelitian tersebut berusaha menggambarkan sebaran pendidikan di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya persoalan sebaran guru dan siswa, serta sarana fisik pendukung berupa perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium, serta ruang kelas (Sugeng Andono, 2008). Namun penelitian tersebut tidak melakukan penelitian mengenai bagaimana pemetaan pendidikan mampu “mendongkrak” partisipasi masyarakat desa tertinggal (miskin) untuk bersekolah.

Sementara hasil penelitian pemetaan yang dilaksanakan di Kota Kediri menunjukkan bahwa terdapat disparitas jumlah sarana sekolah menengah yang ada di masing-masing kecamatan dengan sebaran penduduk yang merata di setiap kecamatan (Kecamatan Mojojoto 87.768 jiwa, Kecamatan Kota 76.638 jiwa, Kecamatan Pesantren 71.766 jiwa) yang tidak diimbangi dengan jumlah sarana sekolah menengah yang ada (Kecamatan Mojojoto 24 sekolah, Kecamatan Kota 22 sekolah, Kecamatan Pesantren 2 sekolah) ([http:// www.theplanner. wordpress.com](http://www.theplanner.wordpress.com)).

Persoalan peningkatan mutu pendidikan dan kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana juga diteliti oleh Jaka Bachtiar Rahman (2009), dengan judul “Survei Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan Jasmani yang Dimiliki Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) se-Kota Pamekasan.” Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan jasmani di sekolah dan khususnya untuk kelancaran kegiatan pembelajaran praktek pendidikan jasmani, maka hendaknya ketersediaan sarana olahraga dipenuhi. Bahkan, karena begitu pentingnya persoalan itu, ia pun merekomendasikan: (1) agar jika sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan jasmani maka hendaknya dapat mencari sarana dan prasarana alternatif sehingga proses pembelajaran praktek dapat terlaksana; (2) hendaknya diperhatikan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan jasmani dari segi kualitas maupun kuantitas; dan (3) bagi sekolah yang tidak mempunyai prasarana pendidikan jasmani, hendaknya menyewa prasarana (lapangan sepak bola, lapangan tolak peluru, lapangan lempar lembing, lapangan lempar cakram, lari, dan kolam renang) di luar sekolah agar proses pembelajaran praktek dapat terlaksana.



---

Hal di atas senada dengan apa yang diungkapkan oleh Heriyanto dan M. Wahyudin (2006), bahwa sarana dan prasarana merupakan kebutuhan yang harus tersedia bagi setiap sekolah, karena mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan meliputi: ruang kelas sesuai dengan jumlah murid, fasilitas ruang untuk kepala sekolah, guru dan tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium IPA dan IPS, ruang tamu, aula, tempat ibadah, peralatan kesenian, peralatan olahraga, WC, serta alat pendukung lainnya seperti LCD, OHP, televisi, komputer dan AC.

Pendidikan di Indonesia cenderung mengabaikan pendidikan di daerah terpencil yang taraf kehidupan masyarakatnya tergolong miskin. Karena itu, buku-buku yang salah satunya berjudul "Orang Miskin Dilarang Sekolah", film dan novel "Laskar Pelangi" tidak akan pernah muncul jika kondisi pendidikan di Indonesia tidak memiliki masalah yang cukup serius. Hal itu juga memberikan gambaran bahwa ada relevansi antara kemampuan akses pendidikan dengan kemiskinan. Sebagai gambaran, sejak 1970 penduduk miskin berjumlah 67,9 juta (58,9%), tetapi pada 1996 turun menjadi 34,5%. Ketika negeri ini dilanda krisis tahun 1998 prosentase penduduk miskin meningkat lagi menjadi 49,5%. Pada 1999 prosentase penduduk miskin kembali turun menjadi 23,4%, namun pada 2004 terjadi lagi peningkatan kemiskinan sebanyak 36,2%. Berdasarkan prosentase kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan, di pedesaan terdapat lebih banyak penduduk miskin dengan komposisi 24,8 juta (20,1%) dan di perkotaan 11,4 juta (12,1%) (Karnesih, 2005). Kenyataan ini mengharuskan kita untuk lebih memprioritaskan pendidikan di kawasan desa terpencil agar akses pendidikan dapat terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Berkenaan dengan akses pendidikan, beberapa kabupaten/kota di Indonesia sangat memprioritaskan masalah-masalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, seperti Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Kediri (2003-2013). Di dalam RTRW tersebut, disebutkan pengembangan sarana pendidikan diprioritaskan menyebar mengikuti persebaran daerah permukiman. Lokasi sarana pendidikan diharapkan berada dalam jarak yang optimum terhadap kawasan penduduk atau daerah permukiman, supaya pelajar tidak memerlukan jarak perjalanan yang jauh untuk menjangkau sarana pendidikan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007-2011 dijelaskan bahwa Rencana Pencapaian Visi Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2007-2011 dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut: (a) tahun 2007 pelayanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk program Wajar Dikdas 9 tahun, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah; (b) tahun 2008 pelayanan pendidikan diarahkan pada peningkatan mutu sarana dan prasarana Program Wajar Dikdas 9 Tahun dan Pendidikan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah; (c) tahun 2009 pelayanan pendidikan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang mutu pendidikan di semua jenjang baik formal maupun non formal, serta peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta rintisan sarana prasarana Wajar Dikdas 12 Tahun. (Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Kediri (2003-2013) ([www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)), diakses tanggal 2 Desember 2009).

Di Kabupaten Banjar jumlah sekolah negeri sebanyak 398 buah, dengan rincian 350 SD Negeri/Inpres, 39 SMTP dan 7 SMTA. Sekolah swasta berjumlah 13 buah. Secara keseluruhan jumlah murid yang ditampung adalah 55.769 orang dengan 4.761 guru, berarti ratio antara guru dan murid berkisar pada perbandingan 1:11. Sementara sekolah yang berada dalam lingkup Kantor Departemen Agama berjumlah 217 buah, dengan 3.012 guru dan 26.872 murid, sehingga ratio guru dan murid sekitar 1:13 (<http://pkbanjar.blogspot.com>). Kajian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan persoalan daerah tertinggal di Kabupaten Banjar. Berdasarkan data PNPM Mandiri, Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki desa tertinggal terbanyak, yakni 49 desa (Sumber: Data PNPM Mandiri 2008).

---

Keadaan tersebut tentu memerlukan analisis yang obyektif, sistematis dan terukur, khususnya sebaran sekolah pada tiap tingkatan wilayah, sumberdaya manusia (SDM), dan sebagainya. Karena terkait dengan isu desa tertinggal, maka penelitian ini akan melakukan analisa (dengan cara memetakan) berbagai kondisi pendidikan yang ada agar akses pendidikan di daerah tertinggal dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah yang diambil berdasarkan temuan penelitian ini.

Diharapkan pemetaan ini bermanfaat sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membenahi pendidikan di daerahnya agar program Wajar Dikdas 9 Tahun dapat terlaksana. Jika hal tersebut dilakukan berarti pemerintah daerah Kabupaten Banjar memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya dan sejalan dengan desentralisasi pendidikan.

## **2. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan kajian ini didasarkan tiga pilar tujuan pendidikan nasional, yaitu (1) pemerataan kesempatan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga pilar tujuan pendidikan nasional tersebut relatif belum tersentuh di seluruh elemen di wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kondisi ini ditunjukkan oleh temuan bahwa pada 2007 di Kabupaten Banjar terdapat 66 jiwa anak tidak sekolah dan 121 jiwa anak putus sekolah yang lokasinya di wilayah tertinggal.

Berdasarkan kondisi di atas maka tujuan penelitian difokuskan pada:

- 1) Mengidentifikasi sebaran (identitas, jumlah dan kategori) anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar,
- 2) Mengidentifikasi faktor penyebab anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar,
- 3) Program kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menuntaskan program Wajib Belajar 9 tahun di daerah tertinggal.

Manfaat pengkajian mengenai pemetaan anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai bahan informasi untuk:

- 1) Pemerintah pusat dalam merumuskan bentuk-bentuk kebijakan bagi pengentasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di daerah tertinggal,
- 2) Pemerintah daerah (Diknas) dan instansi terkait yang terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di daerah tertinggal, khususnya penanggulangan anak tidak sekolah dan putus sekolah melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 3) Perguruan tinggi sebagai agen pembelajaran berperan dalam pengkajian sebagai masukan penting bagi pengambilan kebijakan pemerintah.





### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Rancangan penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan strategis, yaitu (1) pengumpulan data; (2) analisis data; dan (3) penyajian hasil analisis data (pelaporan). Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei yang merupakan suatu metode dalam mengkaji objek penelitian melalui observasi di lapangan (Mantra, 2006) dengan wawancara kuesioner, dan dokumentasi.

#### 3.2. Populasi dan sampel penelitian

Populasi penelitian diambil dari daerah tertinggal di Kabupaten Banjar yang selanjutnya diambil secara purposive sampling di 42 desa yang masuk dalam enam kecamatan menurut kriteria Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008. Sampel penelitian meliputi kepala desa, kepala sekolah dan pemerintah daerah (pejabat Kantor Dinas Pendidikan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar) dengan jumlah 134 sampel.

#### 3.3. Variabel penelitian

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi obyek pengamatan penelitian (Mantra, 2004). Variabel dalam penelitian ini adalah: variabel anak tidak sekolah dan putus sekolah, faktor penyebab dan bentuk kebijakan, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jabaran Variabel, Indikator dan Tolok Ukur Penelitian**

No	Variabel	Indikator (Kriteria)	Tolok Ukur (Parameter)	Cara Pengumpulan Data
1	Anak tidak sekolah dan putus sekolah	1. Identitas 2. Jumlah 3. Sebaran	1. Jenis Kelamin (Laki/Perempuan) 2. Usia (Tahun) 3. Keruangan administratif: (RT, RW, Desa, Kecamatan) dan geografis: (Kondisi wilayah)	Survey Kuisisioner
2	Faktor penyebab anak tidak sekolah dan putus sekolah	1. Kondisi Ekonomi 2. Minat 3. Orang Tua 4. Fasilitas Belajar 5. Cacat/Kelainan Jiwa 6. Sarana dan Prasarana Pendidikan)	1. Kemampuan ekonomi Keluarga (Rp) 2. Mata pencaharian orang tua/keluarga 3. Keberadaan orang tua/ keluarga 4. Perhatian Orang Tua/keluarga 5. Kelengkapan Fasilitas Belajar 6. Kondisi fisik dan psikis anak didik 7. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan	Survey Kuisisioner

#### 3.4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara deskriptif kuantitatif dan kualitatif, yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik pada data primer maupun sekunder.



## 4. TEMUAN DAN SINTESIS

Temuan hasil penelitian di daerah tertinggal Kabupaten Banjar di enam wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Sungai Pinang, diuraikan dalam tiga komponen utama. Tiga komponen tersebut adalah (1) distribusi anak tidak sekolah, anak putus sekolah; (2) faktor penyebab anak tidak dan putus sekolah; dan (3) program kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam mengatasi anak tidak sekolah dan putus sekolah, sebagai berikut:

### 4.1. Faktor penyebab anak tidak sekolah usia 7-15 tahun di daerah tertinggal

Anak tidak sekolah merupakan sebuah kondisi sosial dimana seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, baik pada tingkat SD, SMP dan jenjang pendidikan di atasnya. Anak yang tidak bersekolah dengan kriteria usia 7-15 tahun merupakan pengejawantahan dari kondisi anak tidak sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, atau sering dikenal dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Anak yang tidak sekolah merupakan permasalahan serius di semua negara, karena aspek sumberdaya manusia sangat terkait dengan kelangsungan nasib suatu bangsa. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa yang memiliki kepedulian pada aspek peningkatan sumberdaya manusia telah diaktualisasikan pada UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa pada semua lini dan golongan. Hal ini sesuai dengan salah satu sila Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam hal mendapatkan pendidikan bagi seluruh warganegara di semua wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya anak yang tidak sekolah di berbagai daerah seperti di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tentunya merupakan permasalahan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fenomena anak tidak sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar dengan jumlah 598 jiwa (9,89%) di enam wilayah kecamatan merupakan permasalahan yang harus segera ditemukanali berbagai faktor penyebabnya. Distribusi anak tidak sekolah terhadap jumlah anak usia 7-15 tahun disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Perbandingan Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun terhadap Anak Tidak dan Sekolah Usia 7-15 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar**

No	Kecamatan	Jumlah Usia 7-15 Tahun	Jumlah Anak Tidak Sekolah 7-15 Tahun	Jumlah Anak Sekolah 7-15 Tahun	% Anak Tidak Sekolah 7-15	% Anak Sekolah 7-15 Tahun
1	Sungai Tabuk	3343	211	3132	6,31	93,69
2	Kertak Hanyar	377	17	360	4,51	95,49
3	Aluh-aluh	660	128	532	19,39	80,61
4	Astambul	907	101	806	11,14	88,86
5	Simpang Empat	538	103	435	19,14	80,86
6	Sungai Pinang	221	38	183	17,19	82,81
	Jumlah	6046	598	5448	9,89	90,11

Sumber: Analisis data primer, 2009 (diolah)



Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa 598 jiwa atau 9,89% merupakan bagian dari masyarakat yang kurang beruntung dalam hal mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang sejajar dengan wilayah lainnya. Kondisi geografis wilayah kecamatan daerah tertinggal Kabupaten Banjar secara umum merupakan daerah terisolasi yang bersentuhan secara langsung dengan Pegunungan Meratus dengan keterbatasan akses dan informasi. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat tujuh faktor penyebab anak tidak sekolah, meliputi: (1) tingkat pendapatan orang tua, (2) jumlah beban tanggungan keluarga, (3) perhatian orang tua, (4) anak bekerja, (5) anak tidak minat sekolah, (6) keberadaan orang tua (yatim piatu), dan (7) akses terhadap pendidikan, yang secara rinci tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3. Faktor Anak Tidak dan Sekolah Usia 7-15 Tahun di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjar**

No	Faktor Dominan	Responden	%	Keterangan
1	<b>Tingkat Pendapatan Orang tua</b>	<b>321</b>	<b>54</b>	<b>Pendapatan Rp500.000 - &lt; 1 jt</b>
2	<b>Jumlah beban tanggungan keluarga</b>	<b>334</b>	<b>56</b>	<b>3 - 4 orang</b>
3	Keberadaan orang tua	95	16	Kurang lengkap
4	<b>Kurang mendapatkan perhatian orang tua</b>	<b>255</b>	<b>43</b>	<b>Anak bekerja</b>
5	<b>Internal anak</b>	<b>191</b>	<b>32</b>	<b>Tidak minat</b>
6	Biaya, sarana dan guru	22	4	biaya mahal
7	Akses	40	7	Akses pendidikan

Sumber: Analisis data primer, 2009 (diolah)

Faktor anak tidak sekolah sebagaimana yang diuraikan pada Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa terdapat empat faktor dominan (persentase tertinggi rata-rata) dari tujuh faktor anak tidak sekolah, yakni pendapatan orang tua (rata-rata pendapatan Rp500.000- < Rp1 juta/bulan), jumlah beban tanggungan keluarga (3-4 orang/kk), kurang mendapat perhatian orang tua dengan melibatkan/membiarkan anak bekerja dan internal anak, yakni tidak minat sekolah. Terdapatnya faktor-faktor anak tidak sekolah pada usia 7-15 tahun yang memiliki keamatan dengan jenjang pendidikan orang tua/wali anak dibuktikan dengan 130 responden orang tua (85%) dengan jenjang tidak tamat SD hingga tamat SD, dan 20 responden orang tua (15%) dengan jenjang pendidikan yakni SMP-SMA/ sederajat Selain faktor tersebut itu kondisi geografis yang sulit di wilayah Pegunungan Meratus yang terisolir turut menambah berbagai faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah. Fenomena dan berbagai faktor anak tidak sekolah sebagaimana yang dijelaskan di atas seyogyanya dijadikan dasar pemikiran untuk memecahkan permasalahan anak tidak sekolah, khususnya di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Secara rinci masing-masing faktor diuraikan berikut:



**Tabel 4. Faktor Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendapatan Orang Tua (Rp/Bulan)**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Tingkat Pendapatan Orang Tua (Rp/Bulan)			Total
		< Rp500.000	Rp500.000 s/d <Rp1.000.0000	>Rp1.000.000	
Sungai Tabuk	211	108	78	25	211
Kertak Hanyar	17	11	5	1	17
Aluh-Aluh	128	30	98	0	128
Astambul	101	30	68	3	101
Simpang Empat	103	34	49	20	103
Sungai Pinang	38	15	23	0	38
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>228</b>	<b>321</b>	<b>49</b>	<b>598</b>
	<b>%</b>	<b>38,12</b>	<b>53,67</b>	<b>8,19</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Faktor ekonomi, khususnya tingkat pendapatan orang tua, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, sebagaimana pada tabel di atas, yakni 53,67% berpendapatan Rp500.000 s/d <Rp1.000.000/bulan dan 38,12% dengan pendapatan <Rp500.000/bulan. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan orang tua anak tidak sekolah mayoritas di bawah rata-rata sejahtera atau masuk dalam kategori miskin. Dengan demikian perbaikan sistem perekonomian yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal merupakan pilihan alternatif yang dapat dijalankan dalam rangka menumbuhkembangkan tingkat perekonomian masyarakat. Tingkat pendapatan orang tua dan beberapa faktor lainnya seperti jumlah beban tanggungan keluarga juga adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari serangkaian faktor penyebab, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5. Faktor Anak Tidak Sekolah berdasarkan Jumlah Beban Tanggungan Keluarga**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Beban Tanggungan Keluarga (Jiwa)			Total
		1 s/d 2	3 s/d 4	>5	
Sungai Tabuk	211	51	118	42	211
Kertak Hanyar	17	5	8	4	17
Aluh-Aluh	128	25	86	17	128
Astambul	101	25	55	21	101
Simpang Empat	103	40	49	14	103
Sungai Pinang	38	10	18	10	38
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>156</b>	<b>334</b>	<b>108</b>	<b>598</b>
	<b>%</b>	<b>26%</b>	<b>56%</b>	<b>18%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Jumlah beban tanggungan keluarga (jiwa) merupakan gambaran kondisi beban suatu keluarga untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya. Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar mayoritas keluarga yang anaknya tidak sekolah memiliki jumlah beban tanggungan 3-4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat atau tanggungan keluarga berpotensi pada rendahnya tingkat pendidikan anak. Hal ini juga membuktikan bahwa sasaran program keluarga berencana belum seutuhnya berhasil terrealisasi, sehingga berimplikasi pada semakin besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh masing-masing rumah tangga. Konsep “banyak anak banyak rejeki” mungkin benar bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi, namun tidak selamanya benar bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hal



ini terbukti di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Keluarga dengan angka anak yang tidak bersekolah mempunyai jumlah beban tanggungan keluarga 3-4 orang (56%), sedangkan beban tanggungan 1-2 orang 26% dan beban tanggungan keluarga >5 orang 18%. Status keberadaan orang tua merupakan salah satu dari faktor yang turut menjadi penentu bagi anak tidak sekolah. Status keberadaan orang tua yang lengkap (memiliki ayah dan ibu) tentu akan mempengaruhi kondisi kejiwaan anak untuk memiliki semangat yang tinggi jika dibandingkan dengan anak yang kurang lengkap atau tidak lengkap dalam keberadaan orang tua. Gambaran kondisi status keberadaan orang tua anak yang tidak bersekolah tersaji pada tabel berikut.

Keberadaan orang tua merupakan bagian penting dalam proses pendidikan anak. Keluarga yang bahagia dalam beberapa penelitian telah membuktikan mampu membangkitkan semangat anggota keluarganya, sebaliknya keluarga yang kurang bahagia dapat mempengaruhi capaian prestasi anak dan menyebabkan dampak negatif lainnya, hingga anak tidak sekolah. Tabel 6 menjelaskan bahwa terdapat status orang tua yang kurang lengkap 95 anak (16%), tidak lengkap 63 anak (10%), dan orang tua lengkap 440 anak (74%). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kelengkapan orang tua bukan jaminan anak untuk bisa merasakan pendidikan yang layak karena ada banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan. Anak yang kurang lengkap seperti yatim (tidak memiliki ayah), piatu (tidak memiliki ibu), dan bahkan yatim-piatu (tidak memiliki ayah dan ibu) merupakan fenomena sosial yang membelenggu mereka untuk mensejajarkan dirinya dalam pemerataan pendidikan. Peran keluarga dan orang tua asuh merupakan pilihan alternatif dalam mengurangi beban mental anak yang kurang lengkap dan bahkan tidak lengkap orang tuanya.

**Tabel 6. Faktor Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Status Keberadaan Orang Tua**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Status Keberadaan Orang Tua			Total Faktor
		Lengkap	Kurang Lengkap	Tidak Lengkap	
Sungai Tabuk	211	164	40	7	211
Kertak Hanyar	17	13	3	1	17
Aluh-Aluh	128	43	35	50	128
Astambul	101	81	15	5	101
Simpang Empat	103	102	1	0	103
Sungai Pinang	38	37	1	0	38
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>440</b>	<b>95</b>	<b>63</b>	<b>598</b>
<b>%</b>		<b>74%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

**Tabel 7. Faktor Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Status Keberadaan Orang Tua Anak yang Kurang dan Tidak Lengkap**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Status Keberadaan Orang Tua yang Kurang dan Tidak Lengkap			
		Yatim	Piatu	Yatim Piatu	Cerai
Sungai Tabuk	211	14	9	7	17
Kertak Hanyar	17	2	1	1	0
Aluh-Aluh	128	28	3	50	4
Astambul	101	10	3	5	2
Simpang Empat	103	1	0	0	0
Sungai Pinang	38	1	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>56</b>	<b>16</b>	<b>63</b>	<b>23</b>
<b>%</b>		<b>35%</b>	<b>10%</b>	<b>40%</b>	<b>15%</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Anak yang kurang dan tidak lengkap sebagaimana diuraikan pada Tabel 7 di atas dengan indikator status anak tidak sekolah, yakni yatim, piatu, dan yatim-piatu di daerah tertinggal Kabupaten Banjar tercatat sbb: 63 anak (40%) dengan status yatim piatu, 56 anak (35%) status yatim, 16 anak (10%) status piatu, dan orang tua cerai 23 anak (15%). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan orang tua anak menjadi salah satu faktor penentu anak dalam mendapatkan kasih sayang dan kebutuhan terhadap pendidikan, meskipun secara umum data menunjukkan bahwa di daerah tertinggal hal tersebut bukan faktor utama. Terbukti anak dengan status memiliki orang tua lengkap justru 74% atau 440 jiwa anak tidak bersekolah. Peran keluarga dan orang tua asuh untuk turut serta dalam pembinaan bagi keluarga yang kurang lengkap dan tidak mampu secara finansial merupakan langkah dalam mengurangi angka anak tidak sekolah. Kegiatan sosial ini merupakan bagian bentuk kepedulian pada sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak merupakan salah satu faktor lain yang menyebabkan anak tidak bersekolah. Kurangnya perhatian orang tua anak terindikasi dalam beberapa indikator seperti anak yang bekerja, anak kawin muda, sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Faktor Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Kurangnya Perhatian Orang Tua**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Kurangnya Perhatian Orang Tua		
		Anak Bekerja	Anak Kawin Muda	Total
Sungai Tabuk	211	130	30	160
Kertak Hanyar	17	9	5	14
Aluh-Aluh	128	78	30	108
Astambul	101	1	18	19
Simpang Empat	103	37	13	50
Sungai Pinang	38	0	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>255</b>	<b>108</b>	<b>363</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak merupakan faktor strategis penyebab anak tidak sekolah. Hal ini erat kaitannya dengan kondisi bahwa pada usia 7-15 tahun posisi anak sangat dominan ditentukan oleh kondisi keluarga. Kurangnya perhatian orangtua sebagaimana yang ditemukan pada kondisi nyata lapangan (lihat Tabel 8) merupakan bukti bahwa anak yang bekerja dan anak yang kawin muda banyak dijumpai di daerah-daerah terpencil yang kondisi keluarganya kurang mementingkan nilai-nilai pendidikan anak. Beberapa kasus yang dilansir oleh pemberitaan media televisi seperti kasus Syekh Puji yang menikahi anak di bawah umur dan harus diganjar dengan hukuman penjara, merupakan fenomena sosial di masyarakat yang baru terungkap kepermukaan. Kurangnya kepedulian orang tua merupakan penyebab utama anak menghadapi situasi seperti ini. Anak yang bekerja dan kawin muda merupakan salah satu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya dalam perlindungan anak yang seyogyanya ditegakkan di seluruh daerah, dan khususnya di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Faktor kurangnya perhatian orang tua merupakan bingkai sistem dari maraknya anak tidak sekolah di berbagai daerah, termasuk di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, apalagi bila terdapat berbagai faktor pendukung lainnya, misalnya faktor internal anak itu sendiri, antara lain: minat anak, cacat fisik dan sakit jiwa (mental). Selain faktor kurang perhatian orang tua, faktor internal merupakan faktor lain yang dapat memicu anak tidak sekolah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 9. Faktor Anak Tidak Sekolah Berdasarkan Internal Anak**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Faktor Internal Anak			Total
		Anak Tidak Minat Sekolah	Cacat Fisik	Sakit Jiwa	
Sungai Tabuk	211	67	2	5	74
Kertak Hanyar	17	4	0	0	4
Aluh-Aluh	128	33	1	0	34
Astambul	101	46	4	2	52
Simpang Empat	103	28	0	0	28
Sungai Pinang	38	13	0	0	13
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>191</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>205</b>
<b>%</b>		<b>93%</b>	<b>4%</b>	<b>4%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Faktor internal anak yang meliputi tidak berminatnya anak, cacat fisik dan jiwa sebagaimana pada Tabel 9 menunjukkan bahwa indikator tidak berminat relatif tinggi, yakni 191 anak (93%), cacat fisik dan sakit jiwa masing-masing 7 anak (4%). Faktor internal merupakan faktor yang terbentuk dalam diri anak itu sendiri, namun faktor internal relatif tidak berdiri sendiri karena dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan di luar dirinya), misalnya: kondisi keluarga, lingkungan sekitar, perekonomian keluarga dan beberapa faktor terkait lainnya.

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan minat anak bersekolah. Semakin baik kondisi sarana dan prasarana pendidikan akan memicu minat anak untuk bersekolah, sebaliknya semakin buruk kondisi sarana dan prasarana pendidikan akan mempengaruhi rendahnya minat anak bersekolah. Faktor sarana dan prasarana pendidikan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar meliputi biaya mahal, gedung rusak dan guru jarang datang tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 10. Faktor Anak Tidak Sekolah berdasarkan Biaya, Sarana dan Guru**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Faktor Biaya, Sarana Dan Guru			Faktor
		Biaya Mahal	Gedung Rusak	Guru Jarang Datang	
Sungai Tabuk	211	7	16	2	25
Kertak Hanyar	17	0	0	0	0
Aluh-Aluh	128	0	0	0	0
Astambul	101	3	0	0	3
Simpang Empat	103	0	0	2	2
Sungai Pinang	38	12	0	5	17
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>47</b>
<b>%</b>		<b>47%</b>	<b>34%</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 10 menjelaskan bahwa terdapat 47 anak yang tidak bersekolah karena biaya pendidikan mahal, yakni 22 anak (47%), gedung rusak 16 anak (34%), dan guru jarang datang 9 anak (19%). Biaya mahal merupakan salah satu faktor penyebab. Kondisi ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang sangat sulit dijawab karena faktanya pemerintah telah menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dan memberikan bantuan pada siswa melalui Bantuan Operasional



Sekolah (BOS). Karena itu sosialisasi pendidikan gratis seharusnya lebih ditingkatkan agar paradigma biaya pendidikan yang mahal dan telah terlanjur berkembang di masyarakat dapat berkurang sedikit demi sedikit. Paradigma mengenai biaya pendidikan yang mahal juga diikuti oleh faktor lain. Gedung pendidikan yang rusak, misalnya, juga dapat menyebabkan minat anak untuk bersekolah menjadi rendah, apalagi jika motivasi orang tua kurang mendukung, serta suasana di lingkungan sekolah tidak menunjang karena guru jarang datang. Akibatnya, kondisi psikologis minat anak dan keluarga menjadi semakin rendah. Berbagai faktor ini akhirnya mengakibatkan diambilnya keputusan yang amat sangat keliru, yakni memilih tidak bersekolah. Faktor lain seperti kondisi aksesibilitas (keterjangkauan) menuju satuan pendidikan merupakan faktor lainnya yang turut memegang andil sebagai penyebab anak tidak sekolah, sebagaimana tersaji pada Tabel 11 berikut ini.

**Tabel 11. Faktor Anak Tidak Sekolah Menurut Kondisi Aksesibilitas ke Satuan Pendidikan**

Kecamatan	Anak Tidak Sekolah (Jiwa)	Akses Menuju Satuan Pendidikan				Total
		Akses Pendidikan Jauh	Medan Sulit	Transportasi		
				Transportasi Tidak Ada	Transportasi Mahal	
Sungai Tabuk	211	0	20	3	15	38
Kertak Hanyar	17	0	0	0	0	0
Aluh-Aluh	128	0	0	0	0	0
Astambul	101	35	0	7	1	43
Simpang Empat	103	0	0	4	2	6
Sungai Pinang	38	5	6	2	4	17
<b>Jumlah</b>	<b>598</b>	<b>40</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>104</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Tabel 11 menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas merupakan salah satu faktor penyebab anak tidak sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, yaitu meliputi akses pendidikan yang jauh, medan yang sulit dan masalah transportasi. Akses pendidikan yang jauh terdapat di dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Astambul dan Kecamatan Sungai Pinang, sedangkan medan yang sulit terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sungai Pinang. Permasalahan transportasi karena ketidakterediaan transportasi di daerah tertinggal ditemui di Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kecamatan Sungai Pinang, sedangkan faktor mahal biaya transportasi ditemui di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Astambul.

Faktor-faktor penyebab anak tidak sekolah pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang meliputi tingkat pendapatan orang tua, beban tanggungan orang tua, status keberadaan orang tua, kurangnya perhatian orang tua, kondisi internal anak, sarana dan prasarana pendidikan, aksesibilitas menuju satuan pendidikan pada masing-masing wilayah kecamatan relatif berbeda antara masing-masing wilayah kecamatan di daerah tertinggal Kabupaten Banjar. Perbedaan faktor dominan anak tidak sekolah tersebut relatif dipengaruhi kondisi karakteristik wilayah, meliputi kondisi sosial, ekonomi wilayah yang memiliki persamaan namun terdapat juga perbedaan-perbedaan. Adanya kesamaan faktor penentu anak tidak sekolah akan memudahkan dalam perumusan kebijakan pemerintah, sementara adanya perbedaan faktor penentu ini menunjukkan kejelian dalam melihat kasus-kasus wilayah agar tidak disamaratakan dalam penentuan kebijakan.





## 4.2. Faktor penyebab anak putus sekolah usia 7-15 Tahun

Putus sekolah adalah seseorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan baik pada tingkat SD, SMP, maupun SMA untuk belajar dan menerima pelajaran tetapi tidak sampai tamat atau lulus, kemudian mereka berhenti atau keluar dari sekolah. Putus sekolah dapat pula diartikan sebagai Drop-Out (DO) yang artinya seorang anak didik karena sesuatu hal, biasanya disebabkan karena malu, malas, takut, sekedar ikut-ikutan dengan temannya atau karena alasan lain, menjadi putus sekolah di tengah jalan atau keluar, dan tidak lagi masuk sekolah untuk selama-lamanya.

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa di daerah tertinggal Kabupaten Banjar terdapat 251 jiwa anak yang putus sekolah dengan 10 faktor yang melatarbelakangi. Faktor-faktor tersebut antara lain membantu orang tua, bekerja, malas, berhenti sendiri, IQ rendah, cacat fisik, kawin muda, ikut orang tua, bolos dan faktor ekonomi. Lebih lengkapnya tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 12. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD/MI dan SMP/MTs)**

No	Faktor Dominan	Responden	%
1	Bantu orang tua	6	2.39
<b>2</b>	<b>Bekerja</b>	<b>74</b>	<b>29.48</b>
<b>3</b>	<b>Malas</b>	<b>45</b>	<b>17.93</b>
<b>4</b>	<b>Berhenti sendiri</b>	<b>35</b>	<b>13.94</b>
5	IQ rendah	2	0.80
6	Cacat fisik	3	1.20
<b>7</b>	<b>Kawin muda</b>	<b>57</b>	<b>22.71</b>
8	Ikut orang tua	15	5.98
9	Bolos	1	0.40
10	Ekonomi	13	5.18
<b>Jumlah</b>		<b>251</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

Faktor dominan atau faktor mayoritas anak putus sekolah sebagaimana pada tabel di atas didominasi oleh empat faktor, yakni anak bekerja (29,48%), anak kawin muda/pernikahan dini (22,71%), anak malas (17,93%), dan anak berhenti sendiri (13,94%). Fenomena anak yang putus sekolah yang disebabkan oleh anak bekerja dan kawin muda merupakan fenomena yang menjadi ciri khas di daerah terpencil/tertinggal dengan berbagai latar belakang budaya yang memandang anak sebagai investasi keluarga, takut/malu anak jika tidak kawin. Faktor lain pemicu utama anak putus sekolah seperti anak malas, atau berhenti sendiri adalah faktor internal anak. Peran orang tua dan keluarga menjadi sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai pentingnya pendidikan bagi keluarga. Sebaran faktor penyebab anak putus sekolah menurut wilayah kecamatan tersaji pada tabel berikut.



**Tabel 13. Sebaran Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD/MI dan SMP/MTs) Menurut Wilayah Kecamatan**

Kecamatan	Faktor Anak Putus Sekolah (*)										Jumlah	%
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10		
Sungai Tabuk	1	12	7	6	0	0	6	2	0	2	36	14.34
Kertak Hanyar	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	6	2.39
Aluh-Aluh	0	4	32	0	0	1	5	9	0	0	51	20.32
Astambul	1	1	1	2	2	2	1	1	1	5	17	6.77
Simpang Empat	1	27	5	10	0	0	26	3	0	5	77	30.68
Sungai Pinang	1	27	0	17	0	0	19	0	0	0	64	25.50
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>74</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>251</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Data Primer, 2009 (diolah)

\*) Keterangan: 1= bantu orang tua, 2=bekerja, 3= malas, 4= berhenti sendiri, 5= IQ rendah, 6= cacat fisik, 7= kawin muda, 8= ikut orang tua, 9=bolos, 10=ekonomi

Wilayah kecamatan dengan sebaran angka anak putus sekolah tertinggi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 13 di atas terdapat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Empat (30,68%), Sungai Pinang (25,50%), dan Aluh-Aluh (20,32%). Dibanding dengan wilayah kecamatan lainnya, ketiga wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah yang secara geografis terisolir dan bersentuhan langsung dengan sistem Pegunungan Meratus. Tiga kecamatan tersebut memiliki akses terbatas meskipun mempunyai potensi sumberdaya alam seperti batubara yang hingga saat ini terus dieksploitasi.

Pendidikan Dasar Wajib 9 tahun (pendidikan SD dan SMP/ sederajat) dengan usia 7-15 tahun merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dalam rangka mengurangi angka anak putus sekolah adalah kerjasama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan, khususnya menuntaskan Wajib Belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah.

Tidak intensifnya sosialisasi program pendidikan gratis Wajib Belajar 9 tahun merupakan pemicu anak putus sekolah, sehingga anak memilih bekerja membantu orang tua atau bekerja secara mandiri. Adanya potensi wilayah pertambangan batubara dan perkebunan karet juga menyebabkan anak tertarik untuk mendapat tambahan pendapatan, sehingga akhirnya memilih berhenti sekolah. Pemahaman orang tua/wali tentang pentingnya pendidikan bagi anak menjadi sangat penting, terutama karena kondisi nyata di daerah tertinggal Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa jenjang pendidikan orang tua anak putus sekolah mayoritas tidak tamat SD-tamat SD (59 orang tua atau 94%) dan jenjang pendidikan SMP-SMA (4 orang tua atau 6%) dari total 63 orang tua siswa yang putus sekolah. Akibat lainnya, menikahkan anak pada usia dini merupakan kelaziman di daerah-daerah terpencil, termasuk di Kabupaten Banjar.

Peran pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi serta pemerhati pendidikan sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman pada orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depan anak itu sendiri. Sosialisasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan pembiayaan gratis harus terus digalakkan di daerah-daerah terpencil agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dari aparat pemerintah daerah. Membuka akses di daerah-daerah tertinggal merupakan langkah strategis untuk membuka keterisolasian masyarakat dalam rangka meningkatkan layanan akses pendidikan.

Permasalahan anak tidak sekolah dan putus sekolah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh wilayah Republik Indonesia,

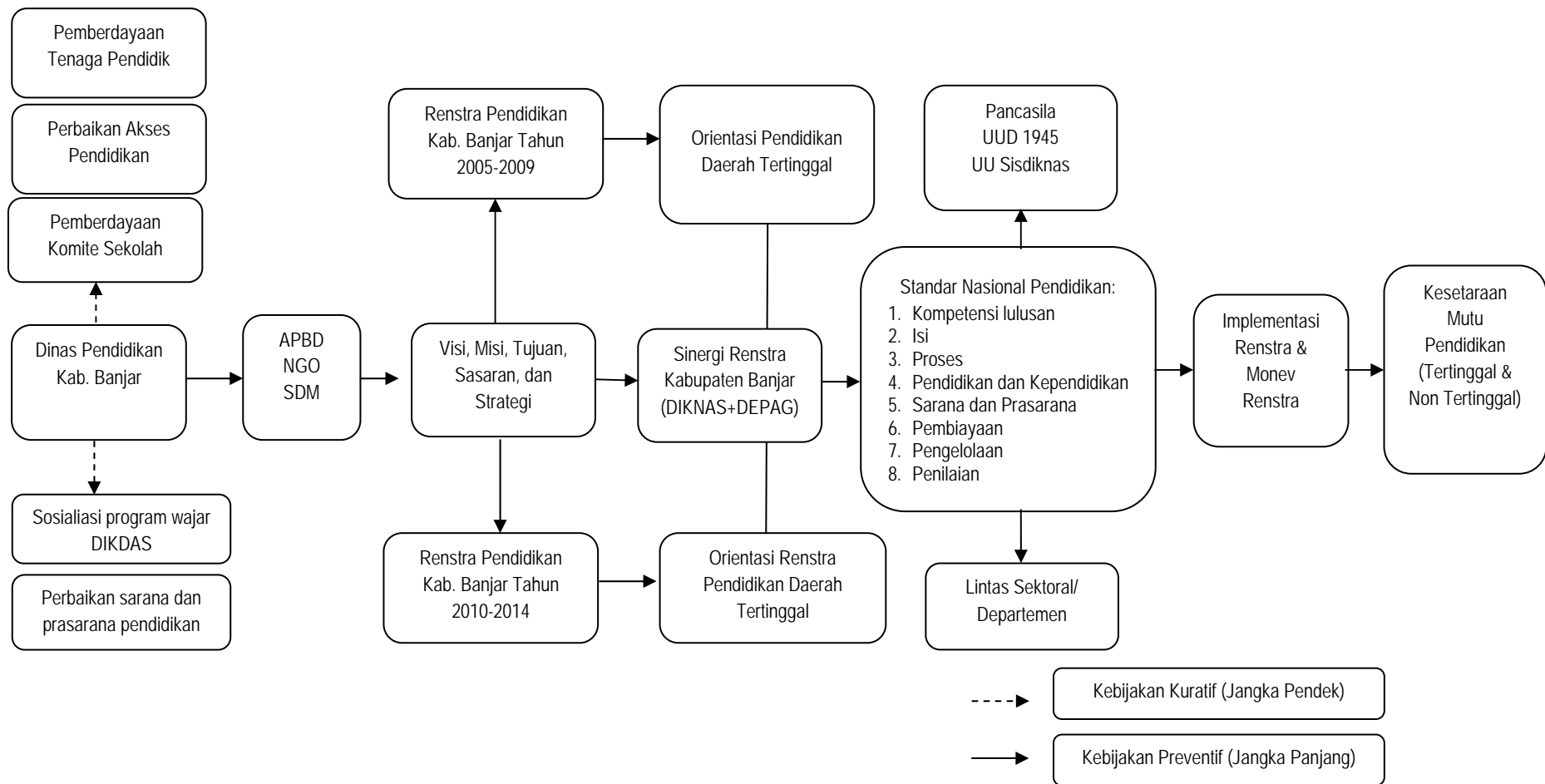


---

khususnya di daerah terpencil. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah kebijakan oleh pemerintah, LSM dan masyarakat untuk secara sinergis melihat kondisi nyata ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, khususnya penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah.

Berdasarkan paparan faktor mengenai anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar, maka dapat disusun skema model alternatif penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah di daerah tertinggal Kabupaten Banjar, baik yang bersifat preventif (jangka panjang) maupun kuratif (jangka pendek) sebagai salah satu upaya meminimalkan jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah dalam rangka mencapai program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang sesuai dengan amanah UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan searah dengan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar. Skema model alternatif tersaji pada gambar berikut:





**Gambar 1. Alur Model Alternatif Kebijakan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah di Daerah Tertinggal Kabupaten Banjarnegara**

---

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah anak tidak sekolah usia 7–15 tahun di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan tercatat 598 jiwa, dengan sebaran jumlah tertinggi hingga terendah, yakni: di Kecamatan Sungai Tabuk (211 jiwa), Aluh-Aluh (128 jiwa), Simpang Empat (103 jiwa), Astambul (101 jiwa), Sungai Pinang (38 jiwa) dan terendah di Kecamatan Kertak Hanyar (17 jiwa).
- 2) Jumlah anak putus sekolah di daerah tertinggal usia 7-15 tahun di Kabupaten Banjar 251 jiwa, dengan sebaran jumlah tertinggi hingga terendah, yakni: di Kecamatan Simpang Empat (77 jiwa), Sungai Pinang (64 jiwa), Aluh-Aluh (51 jiwa), Sungai Tabuk (36 jiwa), Astambul (17 jiwa), dan terendah di Kecamatan Kertak Hanyar (6 jiwa).
- 3) Kondisi geografis wilayah tertinggal Kabupaten Banjar merupakan daerah terisolasi, berada pada suatu sistem Pegunungan Meratus Kalimantan dengan aksesibilitas rendah.
- 4) Terdapat enam faktor penyebab anak tidak sekolah usia 7–15 tahun di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni: jumlah beban tanggungan keluarga (28%), pendapatan orang tua (27%), anak bekerja (21%), anak tidak minat sekolah (16%), yatim piatu (5%), dan kesulitan akses menuju satuan pendidikan (3%).
- 5) Terdapat sepuluh faktor penyebab anak putus sekolah usia 7–15 tahun di daerah tertinggal di Kabupaten Banjar, yakni: anak bekerja (29,48%), kawin muda (22,71%), malas (17,93%), berhenti sendiri (13,94%), ikut orang tua (5,98%), ekonomi orang tua (5,18%), bantu orang tua (2,39%), cacat fisik (1,20%), IQ rendah (0,80%), dan bolos (0,40%).
- 6) Kebijakan Penuntasan Wajib Belajar 9 tahun di daerah tertinggal mengacu pada Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar dan Kementerian Agama dengan melaksanakan revitalisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pada sinerginya Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2005-2009 untuk dilaksanakan pada Tahun 2010-2014 dengan Renstra Kementerian Agama yang berorientasi pada daerah tertinggal berbasis kinerja melalui monitoring dan evaluasi secara berkala.

## 6. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dalam rangka meminimalisir angka anak tidak sekolah dan putus sekolah adalah dapat dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan program pemerataan mutu pendidikan sebagai realisasi rencana strategis pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar.
- 2) Melaksanakan sosialisasi secara intensif tentang pendidikan gratis 9 tahun dan informasi beasiswa sesuai Renstra Pendidikan Kabupaten Banjar pada masyarakat di daerah tertinggal.
- 3) Melakukan pemberdayaan kinerja Komite Sekolah untuk menopang partisipasi aktif orang tua siswa di daerah tertinggal.
- 4) Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan memfasilitasi siswa tidak mampu dan berprestasi untuk mendapatkan beasiswa serta penjangkaran lulusan calon guru yang berkompeteren dan siap ditempatkan di daerah tertinggal.
- 5) Meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan khususnya di daerah tertinggal Kabupaten Banjar melalui pembiayaan multi arah (APBD dan NGO).



---

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (2008) Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Pendidikan Sumber Dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2006 dan 2007 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (2008) Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2008. Martapura: BPS Kabupaten Banjar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar (2007) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007. Banjar: Badan Pusat Statistik
- Kementerian Agama Kabupaten Banjar. (2009) Rencana Kinerja Tahunan 2010. Martapura: Kantor Kementerian Agama
- Kementerian Agama Kabupaten Banjar (2008) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Martapura: Kantor Kementerian Agama
- Kementerian Pendidikan Nasional (2002) Pendidikan berorientasi life skill dengan pendekatan BBE. Jakarta: Depdiknas.
- Dinas Kementerian Pendidikan Kabupaten Banjar (2004) Rencana Strategis Tahun 2005-2009. Martapura: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Dinas Kementerian Pendidikan Kabupaten Banjar (2008) Profil Pendidikan Kabupaten Banjar. Martapura: Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Direktorat Tenaga Kependidikan (2007) Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Fattah, N. (2003) Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Karnesih, Erlis (2005) Pengentasan Penduduk Miskin sebagai Refleksi Otonomi Daerah Di Jawa Barat. Jurnal Sosiohumaniora, Volume 7, Tahun 2005.
- Mantra, Bagoes, Ida (2004) Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marni (2006) Faktor Penghambat Kelulusan SD Melanjutkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Banjarmasin.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri. 2008. Daftar Desa Tertinggal yang Terdapat dalam PNPM Perdesaan. Jakarta: Depsos.
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (2008) Generasi Sehat dan Cerdas. Buletin Kwartalan Edisi 1, Jakarta: Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.

